

**RENCANA KERJA
KECAMATAN TANJUNGANOM
TAHUN 2019**



**KECAMATAN TANJUNGANOM
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2018**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja SKPD merupakan dokumen Rencana Kerja dengan waktu satu tahun yang disusun oleh SKPD sesuai tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Rencana strategis (Renstra) SKPD untuk tahun rencana yang dimaksud. Renja SKPD juga merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPd. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut :

- 1) Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPd;
- 2) Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
- 3) Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatanyang simultan dengan penyusunan RKPd, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- 4) Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
- 5) Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1. Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPd dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karenadidalam Renja

SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

2.1 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tanjunganom Tahun 2020 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025 ;

- 11) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 ;
- 12) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Nganjuk;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 ;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023 ;
- 15) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Tanjunganom ;
- 16) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 12 tahun 2014 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2015 ;
- 17) Keputusan Bupati Nganjuk Nomor Tahun 2018 tentang Pengesahan Rencana Rancangan Akhir Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra) Tahun 2019-2023 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nganjuk ;
- 18) Keputusan Camat Tanjunganom Nomor 188/ /K/411.512/2018 tanggal 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanjunganom Tahun 2019-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tanjunganom Tahun 2020 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tanjunganom adalah :

- 1) Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Tanjunganom ;
- 2) Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program

Rencana Kerja Kecamatan Tanjunganom adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Kecamatan Tanjunganom. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tanjunganom ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Tanjunganom selama tahun 2019 dan perkiraan target tahun 2020.

Pada tahun anggaran 2019 Kecamatan Tanjunganom telah melaksanakan kegiatan sesuai tugas, pokok dan fungsinya menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu :

- 1) Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 ;
- 2) Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun 2019;
- 3) Menyusun Rencana Kerja SKPD ;

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019, pelaksanaan kinerja Kecamatan Tanjunganom ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib . Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

1. Evaluasi Program/kegiatan Tahun 2019

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk pada tahun 2019 sebanyak 6 program, dijabarkan dalam 31 kegiatan dengan alokasi anggaran pada tahun 2019 sebagai berikut :

- Realisasi belanja langsung sampai dengan tanggal 30 Nopember 2019 sebesar Rp. 1.067.560.105,- (Satu Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Lima Rupiah) atau sebesar 44,81 % dari anggaran yaitu Rp. 2.382.303.400,- (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah).

TABEL T-VI.C.29

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2019
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TANJUNGANOM

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluar kegiatan tahun lalu (tahun n-2)			Target program kegiatan (Renja tahun 2019 dan PD n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD sampai dengan tahun berjalan	
					Target renja PD tahun (n-2) (2018)	Realisasi renja PD tahun (n-2) (2018)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2019	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100 %	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	WAJIB									
	Urusan SKPD									
	Pelayanan Administrasi Perkantoran		102,625,000		81.929.000	76.047.334	92,82	78.512.000		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya sarana komunikasi dan sumber daya air, listrik	17.940.000		12.868.000	12.331.334	95,83	16.868.000		
	Penyediaan Alat tulis kantor	Terpenuhinya kelancaran administrasi dan oprasional kantor	10,000,000		6.851.000	6.851.000	100	6.851.000		
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Terwujudnya kelancaran oprasional perkantoran	1,600,000		1.500,000	1.500.000	100	1.583.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum pegawai harian dan makan minum rapat	19,500,000		14.210.000	14.210.000	100	14.210.000		
	Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah Koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan ke luar daerah	25,000,000		22,500,000	20.000,000	88,89	15.000.000		

	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya perjalanan dinas/rapat koordinasi dan komunikasi dalam daerah	15,000,000		24.000.000	21.155.000	88,15	24.000.000		
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		185,000,000		71.136.000	71.136.000	100	182.476.200		
	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya tempat parkir			0	0	0	100.000.000		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan TV LCD dan antenna	45,000,000		18.000.000	18.000.000	100	4.500,000		
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan Komputer			0	0	0	6.500.000		
	Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya pengadaan kursi rapat			0	0	0	7.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dirawat	78,000,000		22.905,000	22.905.000	100	34.245.200		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional	Jumlah kendaraan operasional yang dirawat	21,000,000		19,000,000	19.000.000	100	19,000,000		
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor			0	0	0	6.551.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung yang dirawat	6,000,000		11.231.000	11.231.000	100	4,680,000		
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7,000,000	-	3,500,000	1.260.000	36	3,500,000		
	Penyusunan Laporan capaian kinerja ikhtiar realisasi kinerja OPD	Jumlah laporan yang tersusun	3,500,000	-	2,000,000	2,000,000	100	2,000,000		
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Terlaksananya penyusunan pelaporan semesteran SKPD	500,000	-	500,000	500,000	100	500,000		

	Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtiar prognosis Realisasi Anggaran	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	100	1,000,000		
	Program Kinerja Kelurahan				1.048.003.200	1.035.403.403	98,80	1.771.903.200		
	Penyediaan Biaya Operasional dan Peningkatan Kinerja Kelurahan Tanjunganom				455.452.700	448.586.445	98,49	455.451.700		
	Penyediaan Biaya Operasional dan Peningkatan Kinerja Kelurahan Warujayeng				592.550.500	586.816.958	99,03	610.569.500		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjunganom				0	0	0	319.500.000		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Warujayeng				0	0	0	76.691.000		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjunganom				0	0	0	33.441.000		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Warujayeng				0	0	0	276.250.000		
	Program Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa		232,020,000		232.218.400	217.818.900	93,80	147,318,000		
	Pembinaan Pemerintahan, kelembagaan dan masyarakat Desa/Kelurahan	Terlaksanya pembinaan pemerintahan kelembagaan dan masyarakat	36,000,000		65.485.000	59.088.000	90,23	33,250,000		
	Penyusunan monografi kecamatan dan fasilitasi penyusunan profil desa	Terlaksananya penyusunan monografi kecamatan dan fasilitas penyusunan profil desa	5,000,000		6.800.000	6.800.000	100	3,896,000		
	Penyelenggraan musrenbang kecamatan	Terlaksakannya musrenbang tingkat desa/kelurahan	12,020,000		13.580.000	13.580.000	100	12,020,000		

	Koordinasi musrenbang desa/kelurahan	Terlaksananya koordinasi musrenbang tingkat desa/kelurahan	3,000,000		3,400,000	3.400.000	91,18	1,820,000		
	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	Terlaksananya Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	21,000,000		25.300.000	23.300.000	100	19,700,000		
	Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat	Terlaksananya koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat	18,000,000		40.995.000	40.995.000	100	14,760,000		
	Koordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat	Terlaksananya Kooordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat	40,000,000		26.540.000	18.837.500	70,98	30,360,000		
	Pembinaan dan Pemantauan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pendapatan daerah	32,000,000		50.118.400	50.118.400	100	31,512,000		
	Koordinasi dan pembinaan bidang sarpras	Jumlah koordinasi dan pembinaan Sarpras	10,000,000		pada tahun 2018 tidak ada kegiatan ini					
	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	Jumlah lembaga yang terbina	10,000,000							
	Peringatan Hari Besar Nasional, Daerah dan keagamaan	Jumah hari besar yang diperingati	45,000,000							
	Program Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat		22,500,000							
	Pembinaan tata kelola perencanaan, keuangan, aset, dan pertanggungjawaban desa	Jumlah dokumen yang tersusun sesuai jadwal	5,000,000		pada tahun 2018 tidak ada kegiatan ini			pada tahun 2019 tidak ada kegiatan ini		
	Pembinaan administrasi dan data desa	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	10,000,000							
	Monitoring Evaluasi kinerja pemerintah desa	Tercapainya jumlah monitoring evaluasi kinerja pemerintah desa	7,500,000							

	JUMLAH	568,945,000		376,611,800	246,028,661	65	403,359,000		
--	--------	-------------	--	-------------	-------------	----	-------------	--	--

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis standar kebutuhan pelayanan sendiri dirumuskan indikator untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Tanjunganom yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Tanjunganom Tahun 2019-2023, hal ini dikarenakan tidak ada acuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Tanjunganom.

Pelaksanaan program kegiatan pada Kecamatan Tanjunganom pada tahun 2019 sebagian besar dapat memenuhi target output pada tahun berkenaan, namun menurut ketentuan bahwa data pencapaian kinerja pelayanan SKPD tiga tahun dari tahun perencanaan sehingga data n-2 tidak ditampilkan karena penyusunan Renja Tahun 2020 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Kecamatan Tanjunganom Tahun 2019-2023.

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tanjunganom
Kabupaten Nganjuk

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Tahun Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
			2019			2019	2019	2020	2021	2021	2023
1.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Tugas Kecamatan	Baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2.			100 %	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa/Kelurahan	Persentase hasil koordinasi dan pembinaan yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial & Sarana prasarana	85%	85%	85%	90%	95%	100 %
			100 %		Persentase desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Dari uraian gambaran pelayanan pada BAB II ditelaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup di Kecamatan Tanjunganom bahwa ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;
- 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;

- 4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Tanjunganom dilakukan guna memberikan penjelasan tentang perbedaan atau perbandingan antara rancangan awal dengan pelaksanaan yaitu :

1. Review dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan pada tahun yang bersangkutan
2. Perbedaan antara rancangan awal dengan setelah proses berjalan diantaranya dikarenakan terdapat program dan kegiatan baru yang sebelumnya belum dimasukkan dalam rancangan awal RKPD tetapi program atau kegiatan tersebut harus dilaksanakan, termasuk besaran yang perlu adanya penyesuaian

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kabupaten Nganjuk
Perangkat Daerah Kecamatan Tanjunganom

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pelayanan Adm Perkantoran	Prambon	Prosen pelayananter padu yg sesuai SOP	82%	102.625.000	Pelayanan Adm Perkantoran	Prambon	Prosen pelayananter padu yg sesuai SOP	82%	126.800.000	
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sda	Prosentase sarana prasarana yg layak	82%	185.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sda	Prosentase sarana prasarana yg layak	82%	130.000.000	
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Sda	Peningkatan Tingkat Kedisiplinan ASN	19 Orang	19.800.000	Peningkatan Disiplin Aparatur	Sda	Peningkatan Tingkat Kedisiplinan ASN	19 Orang	19.800.000	
3.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	Sda	Jumlah dokumen yang tersusun tepat waktu	6 dokumen	7.000.000	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	Sda	Jumlah dokumen yang tersusun tepat waktu	6 dokumen	7.000.000	
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Sda	Prosentase hasil koordinasi	45 koordinasi	232.020.000	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Sda	Prosentase hasil koordinasi	45 koordinasi	232.020.000	
5.	Program Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Sda	Prosentase Desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik	14 Desa	22.500.000	Pembinaan Pemerintahan Desa	Sda	Prosentase Desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik	14 Desa	22.500.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan Tanjunganom akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan desa, dari kelompok masyarakat maupun dari UPTD di Kecamatan Tanjunganom yang langsung ditujukan kepada Kecamatan Tanjunganom maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan melalui pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Tanjunganom Tahun 2020 didasarkan kepada Rancangan Renstra Kecamatan Tanjunganom Tahun 2019-2023 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2019, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Rencana Kerja (RENJA) SKPD yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Tanjunganom Tahun 2020 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1.1 Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019, arah kebijakan umum pembangunan nasional ditujukan kepada 3 (tiga) aspek sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan ;
- 2) Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan ;
- 3) Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh;
- 4) Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah ;
- 5) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemeratan ;
- 6) Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan ;
- 7) Mitigasi bencana alam dan perubahan.

Untuk memudahkan implementasi dan mengukur tingkat keberhasilan dari visi dan misi pemerintah 2019-2023, arah kebijakan umum pembangunan nasional telah dijabarkan dan dirumuskan ke dalam 9 (sembilan) agenda prioritas nasional yaitu:

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara ;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya ;
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan ;
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya ;

- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia ;
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional ;
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor Sektor strategis ekonomi domestik ;
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa ;
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan, yaitu :

- 1) Bidang sosial budaya dan kehidupan beragama ;
- 2) Bidang ekonomi ;
- 3) Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- 4) Bidang sarana dan prasarana ;
- 5) Bidang politik ;
- 6) Bidang pertahanan dan keamanan ;
- 7) Bidang hukum dan aparaturnya ;
- 8) Bidang wilayah dan tataruang ;
- 9) Bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup ;

3.1.2 Kebijakan Provinsi.

Kebijakan Provinsi Jawa Timur yang dijadikan acuan adalah kebijakan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023. Guna lebih mempertajam Visi dan Misi serta derivasinya pada strategi Pembangunan Jangka Menengah Jawa Timur tahun 2019-2023 ke dalam pilihan program unggulan serta program prioritas di masing-masing misi disinergikan agar lebih tepat terstruktur, maka diperlukan kebijakan yang memenuhi minimal empat perspektif yaitu :

- 1) Kebijakan umum pada perspektif masyarakat atau layanan yang didesain tidak hanya untuk masyarakat tertentu (kaya atau miskin) saja, namun lebih dari itu semua lapisan difasilitasi guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih berkeadilan.
- 2) Kebijakan umum pada perspektif proses internal, antara lain diarahkan guna mengantisipasi kompleksitas beban kerja pemerintahan dalam merespons tuntutan internal organisasi maupun eksternal pelayanan kepada masyarakat (domestik dan internasional) dengan lebih baik.
- 3) Kebijakan umum pada perspektif kelembagaan antara lain diarahkan pada optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi baik melalui upaya perbaikan Regulasi (administrasi), pengembangan Skill dan Manajemen Sumber Daya Manusia baik pada sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya, dan

optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai penunjang kinerja birokrasi, serta kontrol (masyarakat).

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Misi Kecamatan Tanjunganom, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Tanjunganom Tahun 2020, yaitu :

a. Tujuan.

Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan

b. Sasaran.

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
- 2) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2020 dirangkum dalam tabel berikut :

Tabel
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan Tanjunganom Tahun 2020

Tujuan : Meningkatnya Sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan			
No	Sasaran	Program	Kegiatan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya aira listrik 2. Penyediaan alat tulis kantor 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6. Penyediaan makanan dan minuman 7. Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9. Penyediaan alat dan bahan pembersih 10. Penyediaan jasa surat menyurat 11. Penyebarluasan informasi program/kegiatan OPD 12. Penyediaan peralatan rumah tangga 13. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 14. Pengadaan peralatan gedung kantor 15. Pengadaan mebeleur 16. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 17. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 18. Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor 19. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 20. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya 21. Pelaksanaan senam Kesegaran Jasmani
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 2. Program Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa 2. Penyusunan Monografi kecamatan dan fasilitas penyusunan profil desa 3. Penyelenggaraan musrenbang kecamatan 4. Koordinasi musrenbang desa/kelurahan 5. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa 6. Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat 7. Koordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat 8. Pembinaan dan pemantauan Pendapatan Daerah 9. Koordinasi dan Pembinaan bidang Sarpras 10. Pembinaan 10 Program Pokok PKK 11. Peringatan Hari Besar Nasional, Daerah, dan Keagamaan 12. Pembinaan tata kelola perencanaan, keuangan, aset dan pertanggungjawaban desa 13. Pembinaan administrasi dan data desa 14. Monitoring evaluasi kinerja pemerintah desa

3.3 Program dan Kegiatan.

Program, kegiatan dan pendanaan, disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan sumber pendanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah. Sementara itu PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa “ Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD menggunakan bahan dari Rencana Kerja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah “. Oleh sebab itu Rencana Kerja Kecamatan Tanjunganom disusun dengan bentuk matrik yang berisikan penjelasan mengenai urusan program dan kegiatan prioritas, beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif untuk tahun 2018 s/d tahun 2019 serta sumber dana kegiatan. Matrik Kecamatan Tanjunganom dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kecamatan Tanjunganom

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WAJIB								
	Urusan OPD								
	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Kecamatan Tanjunganom	12 bulan	102,625,000	APBD		12 bulan	111,000,000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa yang tersedia (Telpon, listrik, dan internet)	Kecamatan Tanjunganom	12 bulan	18,000,000	APBD	Kegiatan Lanjutan	12 bulan	20,000,000
	Penyediaan Alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Kecamatan Tanjunganom	12 bulan	10,000,000	APBD	Kegiatan Lanjutan	12 bulan	10,500,000
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Tanjunganom	12 bulan	1,600,000	APBD	Kegiatan Lanjutan	12 bulan	1,800,000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia	Kecamatan Tanjunganom	12 bulan	1,700,000	APBD	Kegiatan Lanjutan	12 bulan	1,900,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dan jenis bahan bacaan	Kecamatan Tanjunganom	12 bulan	3,700,000	APBD	Kegiatan Lanjutan	12 bulan	3,800,000

	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Kecamatan Tanjunganom	12 bulan	19,500,000	APBD	Kegiatan Lanjutan	12 bulan	21,500,000
	Koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi dalam kunjungan kerja	Kecamatan Tanjunganom	12 bulan	25,000,000	APBD	Kegiatan Lanjutan	12 bulan	25,000,000
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pegawai yang melakukan monitoring dan evaluasi	Kecamatan Tanjunganom	12 bulan	15,000,000	APBD	Kegiatan Lanjutan	12 bulan	17,000,000
	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya tenaga pengiriman surat	Kecamatan Tanjunganom	12 bulan	1,000,000	APBD	Baru	12 bulan	1,500,000
	Penyebarluasan informasi program/kegiatan OPD	Jumlah dan jenis informasi yang dipublikasikan	Kecamatan Tanjunganom	12 bulan	1,000,000	APBD	Baru	12 bulan	1,500,000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Kecamatan Tanjunganom	12 bulan	3,000,000	APBD	Baru	12 bulan	3,000,000
	Pengadaan peralatan dan bahan pembersih	Tersedianya peralatan dan bahan pembersih	Kecamatan Tanjunganom	4 jenis	3,125,000	APBD	Baru	12 bulan	3,500,000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Kecamatan Tanjunganom		185,000,000	APBD			170,000,000
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung yang tersedia	Kecamatan Tanjunganom	1 paket CCTV, 1 paket Proyektor, 1 Lemari Es	45,000,000	APBD	Kegiatan Lanjutan		32,000,000
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Kecamatan Tanjunganom	1 mesin facsimile	10,000,000	APBD	Kegiatan Lanjutan		25,000,000

	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang tersedia	Kecamatan Tanjunganom	1 set sofa	20,000,000	APBD	Baru		-
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dirawat	Kecamatan Tanjunganom	100%	78,000,000	APBD	Kegiatan Lanjutan	100%	80,000,000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dan jenis barang yang tersedia	Kecamatan Tanjunganom	100%	21,000,000	APBD	Kegiatan Lanjutan	100%	22,000,000
	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terawat	Kecamatan Tanjunganom	100%	6,000,000	APBD	Kegiatan Lanjutan	100%	6,000,000
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang terawat	Kecamatan Tanjunganom	100%	5,000,000	APBD	Baru	100%	5,000,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Kecamatan Tanjunganom		19,800,000	APBD			74,800,000
	Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kecamatan Tanjunganom	19 pegawai	15,000,000	APBD	Baru	19 pegawai	15,000,000
	Pelaksanaan senam Kesegaran Jasmani	Jumlah instruktur senam yang mendapat honor	Kecamatan Tanjunganom	1 kegiatan	4,800,000	APBD	Baru	1 kegiatan	4,800,000
	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Tersusunnya Sistem Informasi Layanan Publik	Kecamatan Tanjunganom	1 kegiatan	-	APBD	Baru	1 kegiatan	25,000,000
	Seminar, lokakarya, bimbingan Teknis dan Studi Banding	Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang penguasaan bahasa, etiket pelayanan,	Kecamatan Tanjunganom	1 kegiatan	-	APBD	Baru	1 Kegiatan	30,000,000

		pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa pemerintah							
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Tanjunganom		7,000,000				7,500,000
	Penyusunan Laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah laporan yang tersusun tepat waktu	Kecamatan Tanjunganom	3 dokumen	3,500,000	APBD	Kegiatan Lanjutan	3 dokumen	4,000,000
	Penyusunan Perencanaan, kegiatan dan anggaran	Tersusunnya dokumen Renstra, Renja, RKA/DPA	Kecamatan Tanjunganom	3 dokumen	2,000,000	APBD	Baru	3 dokumen	2,000,000
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan semesteran tepatwaktu	Kecamatan Tanjunganom	2 kali	500,000	APBD	Kegiatan Lanjutan	2 kali	500,000
	Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Kecamatan Tanjunganom	1 kali	1,000,000	APBD	Kegiatan Lanjutan	1 kali	1,000,000
	Program Pembina Pemerintah, Kelembagaan dan Masyarakat Desa		Kecamatan Tanjunganom		232,020,000				252,500,000
	Pembina Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa	Tercapainya jumlah pembinaan kepada kelembagaan dan masyarakat	Kecamatan Tanjunganom	5 kegiatan	36,000,000	APBD	Kegiatan Lanjutan	5 kegiatan	40,000,000

	Penyusunan monografi kecamatan dan fasilitasi penyusunan profil desa	Terlaksananya Penyusunan monografi Kecamatan dan fasilitas penyusunan profil desa	Kecamatan Tanjunganom	2 kegiatan	5,000,000	APBD	Kegiatan Lanjutan	2 kegiatan	6,000,000
	Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan	Tersusunya dokumen usulan kegiatan pembangunan tingkat kecamatan	Kecamatan Tanjunganom	1 kegiatan	12,020,000	APBD	Kegiatan Lanjutan	1 kegiatan	15,000,000
	Koordinasi musrenbang desa/kelurahan	Jumlah desa yang difasilitasi	Kecamatan Tanjunganom	1 kegiatan	3,000,000	APBD	Kegiatan Lanjutan	1 kegiatan	3,000,000
	Pembinaan Adminstrasi dan pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang dibina administrasinya	Kecamatan Tanjunganom	2 kegiatan	21,000,000	APBD	Kegiatan Lanjutan	2 kegiatan	23,000,000
	Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat	Jumlah kegiatan koordinasi pengendalian keamanan kecamatan	Kecamatan Tanjunganom	15 koordinasi	18,000,000	APBD	Baru	15 koordinasi	18,500,000
	Koordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat	Jumlah dan jenis lembaga kemasyarakatan yang dibina	Kecamatan Tanjunganom	4 kegiatan	40,000,000	APBD	Baru	4 kegiatan	40,000,000
	Pembinaan dan pemantauan Pendapatan Daerah	Prosentase pemasukan pendapatan daerah	Kecamatan Tanjunganom	1 kegiatan	32,000,000	APBD	Baru	1 kegiatan	32,000,000
	Koordinasi bidang Sarana dan Prasarana	Jumlah koordinasi dan pembinaan bidang Sarpras	Kecamatan Tanjunganom	2 kegiatan	10,000,000	APBD	Baru	2 kegiatan	10,000,000
	Pembinaan 10 program pokok PKK	Jumlah lembaga yang dibina	Kecamatan Tanjunganom	3 jenis	10,000,000	APBD	Baru	3 jenis	15,000,000

	Peringatan Hari Besar Nasional, Daerah, dan Keagamaan	Jumlah hari besar nasional, daerah, keagamaan yang diperingati	Kecamatan Tanjunganom	3 jenis	45,000,000	APBD	Baru	3 jenis	50,000,000
	Program Pembinaan Pemerintahan Desa/ Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Tanjunganom		22,500,000				25,000,000
	Pembinaan tata kelola perencanaan, keuangan, aset, dan tanggung jawab desa	Tercapainya jumlah pembinaan tata kelola perencanaan, keuangan dan aset serta pertanggungjawaban keuangan desa	Kecamatan Tanjunganom	2 kegiatan	5,000,000	APBD	Baru	2 kegiatan	5,000,000
	Pembinaan administrasi dan data desa	Tercapainya jumlah pembinaan administrasi dan penyusunan data desa	Kecamatan Tanjunganom	2 kegiatan	10,000,000	APBD	Baru	2 kegiatan	10,000,000
	Monitoring evaluasi kinerja pemerintah desa	Tercapainya jumlah monitoring evaluasi kinerja pemerintah desa	Kecamatan Tanjunganom	1 kegiatan	7,500,000	APBD	Baru	1 kegiatan	10,000,000
	TOTAL				568,945,000				640,800,000

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tanjunganom Tahun 2020 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Tanjunganom Tahun 2019-2023. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan teknis tahunan bagi SKPD yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam RENJA Kecamatan Tanjunganom Tahun 2020 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2018-2023, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Renja Kecamatan Tanjunganom tahun 2020, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang ;
- 2) Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunannya yang telah dilaksanakan ;
- 3) Penyusunan Renja Kecamatan Tanjunganom Tahun 2020 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, karena aturan dan tata cara penyusunan Renja masih belum sepenuhnya dipahami ;
- 4) Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN ;
- 5) Rencana Kerja (RENJA) SKPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN,

RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Nganjuk dan Renstra SKPD) ;

- 6) Renja Kecamatan Tanjunganom Tahun 2020, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusankebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan ;
- 2) Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan ;
- 3) Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana ;
- 4) Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai dapat berimbang ;
- 5) Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakankoordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna ;
- 6) Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud ;
- 7) Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan ;

- 8) Merancang sebuah sistem perencanaan melalui sistem e-planning untuk menjaga konsistensi perencanaan dari perencanaan sampai dengan penganggaran sehingga dapat mempercepat waktu penyusunan dokumen perencanaan serta pelaporannya.

Tanjunganom, 30 Nopember 2019



Drs/ BAMBANG SUBAGIO, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19640608 199403 1 010